

**Judul** : Wajah Pelabuhan Muara Baru Buruk Rupa, KKP Malu Dong ...  
**Tanggal** : Jumat, 12 November 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Pembeli Luar Negeri Bakal Kabur

# Wajah Pelabuhan Muara Baru Buruk Rupa, KKP Malu Dong...

Senayan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak ragu mengambil alih pengelolaan pelabuhan perikanan yang rusak dan tidak terawat dari Perum Perikanan Indonesia (Perindo). Salah satunya, pelabuhan perikanan Nizam Zachman di Muara Baru yang saat ini rusak berat.

KETUA Komisi IV DPR Sudin mengatakan, dari informasi yang didapatnya, KKP hanya memungut tarif parkir Rp 3.000 dari pelabuhan Nizam Zachman. Selebihnya merupakan tanggung jawab Perindo yang kini sudah bergabung menjadi holding bersama PT Perikanan Nusantara (Perinus persero).

"Jadi kalau jalanan rusak, kemudian pembuangan air ke laut tidak ada, itu tidak ada urusan sama dia. Saran saya, karena ini pelabuhan merupakan tanggung jawab Dirjen Perikanan Tangkap KKP, ambil alih saja kembali sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku," tegas Sudin di Jakarta, kemarin.

Sudin bilang, harusnya KKP malu melihat situasi pelabuhan

Nizam Zachman yang kurang terurus. Untuk apa KKP memiliki pelabuhan perikanan, sementara pengelolaan dan uang sewa semuanya diambil semua sama Perindo.

Sudin lalu menunjukkan rekaman foto dan video kerusakan jalan di pelabuhan Nizam yang juga tergenang banjir cukup dalam. KKP diminta menyikapi serius persoalan pelabuhan yang merupakan wajah industri perikanan Indonesia. Akan sangat memalukan jika buyer dari luar negeri menyaksikan kondisi pelabuhan saat hendak membeli ikan untuk diekspor.

"Perindo dan Perinus ini kan sudah digabung. Jangankan dua perusahaan perikanan, 100 perusahaan pun kalau tidak punya

visi dan niat baik untuk bekerja bakal wassalam," tegas politisi banteng dapi Lampung ini.

Sementara, anggota Komisi IV Haeruddin meminta KKP membantu kesulitan nelayan untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Sebab yang terjadi saat ini, BLU sudah bertindak lebih jauh dari bankir.

Bukan hanya karena sistem administrasinya yang rigat, lanjutnya, tapi syarat untuk mendapatkan bantuan terbilang sangat berat. "Kalau orang minjam ke BLU dan BRI, itu lebih cepat cair BRI. Padahal statusnya BLU. Modal dan putaran dananya pun riil," katanya.

Politisi PAN ini merekomendasikan sejumlah nelayan untuk mendapatkan akses permodalan di BLU ini, tapi ternyata semuanya mengeluh dan protes lantaran proses pencairannya rumit. Menteri Kelautan dan Perikanan

(MKP) diminta tidak ragu memecat Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahril. "Kalau saudara Syahril ini tidak mampu jadi direktur ya ganti saja," tegasnya.

Anggota Komisi VI Riezki Arilia menambahkan, postur anggaran KKP saat ini terbilang cukup besar. Sayangnya, keberpihakan KKP ke nelayan dan masyarakat pesisir itu tidak terlihat. Padahal, mereka ini adalah kelompok masyarakat yang paling rendah nilai tukarnya. "Permasalahan KKP itu selalu sama. Tidak berpihak kepada masyarakat nelayan yang mana, mohon maaf, dibanding petani nilai tukarnya paling kecil," tegasnya.

Riezki juga menyatakan keberatan dengan program Shrimp Estate (budi daya udang berskala besar) yang mulai dikerjakan KKP tahun depan. Pasalnya, program yang menelan biaya dari APBN sebesar Rp 250 miliar ini belum menyentuh langsung kepada kehidupan para nelayan.

Sementara itu, Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, semua pelabuhan perikanan yang ada saat ini semua sudah di bawah tanggung jawab Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Karena itu, jika dalam pengelolaannya terjadi permasalahan, akan menjadi tanggung jawab di direktorat yang bersangkutan.

"Jadi kalau wajah pelabuhan apalagi yang internasional buruk rupa, itu Dirjen Tangkap yang akan bertanggung jawab berdasarkan Kepmen baru termasuk di Muara Baru," tegasnya.

KKP, lanjutnya, sudah menginstruksikan setiap program termasuk pengadaan, sudah harus mulai berjalan dari awal tahun. Tidak seperti sekarang, jelang akhir tahun masih ada yang belum tuntas. "Tidak boleh lagi main di belakang dalam arti kata di akhir tahun. Maunya saya itu Juli semua sudah tuntas. Jadi Kemenkeu tidak refocussing kita, karena uangnya sudah digunakan," katanya. ■ KAL